

**LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PENGADILAN AGAMA
JAKARTA PUSAT BULAN FEBRUARI
2020**

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai Pelayanan Publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Instansi Pemerintah yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi di Pengadilan.

B. Tujuan

1. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Area II Penataan Tatalaksana dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK) di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan pemberian informasi public terdapat ketidak sesuaian yang perlu ditindaklanjuti.

C. Casar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang - undang Namer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi di Pengadilan.

D. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme pelaksanaan monitoring yang dilakukan Yaitu:

1. Melihat langsung/kunjungan ke lokasi pelayanan informasi public pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),
2. Melalui Website Pengadilan Agama Jakarta Pusat (secara online),
3. Menggunakan laporan/dokumen pelayanan informasi.
4. Pendaftaran gugatan mandiri secara online
5. Pendaftaran secara elektronik (e-cort)

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik bulan Februari 2020:

No	JENIS INFORMASI	HASIL MONEV	KETERANGAN
1	Layanan informasi pada pelayanan Terpadu Satu Pintu	Petugas informasi sudah melakukan pelayanan perkara sebanyak 147 layanan	Petugas sudah memberikan pelayanan dengan baik dan sesuai SOP
2	Layanan informasi perkara pada (WEB) :	Data realisasi anggaran february 2020 sudah diupload tepat waktu	Informasi tersampaikan
	- Anggaran DIPA		
	- Informasi penyelesaian perkara	Informasi dan stastistik penyelesaian perkara telah diupload tepat waktu	Informasi tersampaikan
	- Penanganan pengaduan	Informasi pengaduan telah tersedia	Informasi tersampaikan
	- Gugatan secara mandiri	Informasi gugatan mandiri telah tersedia	Informasi tersampaikan
- Pendaftaran secara electronic (e-cort)	Informasi pendaftaran secara elektronik (e-Cort)	Informasi tersampaikan	

E. Kesimpulan


Dari hasil monitoring terhadap pelayanan informasi selama bulan Februari 2020 diperoleh hasil bahwa pada semua jenis informasi yang diberikan tidak ditemui adanya masalah dan pemberian informasi telah berjalan dengan baik dan sesuai SOP. Peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat harus terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk semua jenis informasi yang diberikan.

F. Rekomendasi

Diharapkan dengan Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini Pengadilan Agama Jakarta Pusat mampu memenuhi fungsinya sebagai pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Peningkatan pelayanan informasi juga harus dilakukan kepada petugas pemberi informasi sehingga masyarakat selalu memberikan respon positif terhadap pelayanan pengadilan.

Jakarta 02 Maret 2020

Kordinator area II


H.M. Arief. S.H., M.H

NIP. 196406271992031006

**LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PENGADILAN AGAMA
JAKARTA PUSAT BULAN MARET
2020**

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai Pelayanan Publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Instansi Pemerintah yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi di Pengadilan.

B. Tujuan

1. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Area II Penataan Tatalaksana dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK) di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan pemberian informasi public terdapat ketidaksesuaian yang perluditindaklanjuti.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi di Pengadilan.

D. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme pelaksanaan monitoring yang dilakukan Yaitu:

1. Melihat langsung/kunjungan ke lokasi pelayanan informasi public pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),
2. Melalui Website Pengadilan Agama Jakarta Pusat (secara online),
3. Menggunakan laporan/dokumen pelayanan informasi.
4. Pendaftaran gugatan secara mandiri
5. Pendaftaran secara elektronik (e-cort)

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik bulan Maret 2019:

No	JENIS INFORMASI	HASIL MONEV	KETERANGA N
1	Layanan informasi pada pelayanan Terpadu Satu Pintu	Petugas informasi sudah melakukan pelayanan perkara sebanyak 104 layanan	Petugas sudah memberikan pelayanan dengan baik dan sesuai SOP
2	Layanan informasi perkara pada (WEB) :	Data realisasi anggaran Maret 2020 sudah diupload tepat waktu	Informasi tersampaikan
	- Anggaran DIPA		
	- Informasi penyelesaian perkara	Informasi dan stastistik penyelesaian perkara telah diupload tepat waktu	Informasi tersampaikan
	- Penanganan pengaduan	Informasi pengaduan telah tersedia	Informasi tersampaikan
	- Gugatan secara mandiri	Informasi gugatan mandiri telah tersedia	Informasi tersampaikan
- Pendaftaran secara electronic (e-cort)	Informasi pendaftaran secara elektronik (e-Cort)	Informasi tersampaikan	

E. Kesimpulan

Dari hasil monitoring terhadap pelayanan informasi selama bulan Maret 2020 diperoleh hasil bahwa pada semua jenis informasi yang diberikan tidak ditemui adanya masalah dan pemberian informasi telah berjalan dengan baik dan sesuai SOP.


Peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat harus terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk semua jenis informasi yang diberikan.

F. Rekomendasi

Diharapkan dengan Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini Pengadilan Agama Jakarta Pusat mampu memenuhi fungsinya sebagai pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Peningkatan pelayanan informasi juga harus dilakukan kepada petugas pemberi informasi sehingga masyarakat selalu memberikan respon positif terhadap pelayanan pengadilan.

Jakarta 01 april 2020

Kordinator area II



H.M. Arief. S.H.,M.H

NIP. 196406271992031006

EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK
TRIWULAN I TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Uraian	Bobot	Nilai	Evaluasi
SIPP	30%	26,21%	Akan meningkatkan percepatan penyelesaian perkara Meningkatkan raport kinerja penanganan perkara
e-Court	5%	5,00%	Supaya dipertahankan
Kasasi/ PK	5%	1,20%	Akan Mengirimkan beril(as Kasasi atau PK dengan cepat dan lengkap
ABS	5%	5,00%	Supaya dipertahankan
SIKEP	5%	4,96%	Akan dilengkapi kekurangannya
SKP	5%	5,00%	Supaya dipertahankan
DIPA 01	5%	5,00%	Supaya dipertahankan
DIPA 04	5%	5,00%	Supaya dipertahankan
PTSP	5%	5,00%	Supaya dipertahankan
APM	5%	5,00%	Supaya dipertahankan
Website	5%	4,90%	Akan mengupdate dan melengkapi konten website
Inovasi	5%	0,75%	Akan lebih memotivasi dan memaksimalkan inovasi yang sudah ada dan berusaha untuk membuat inovasi-inovasi pelayanan publik baru yang bermanfaat
Juara	5%	0,71%	Akan meningkatkan kinerja kesekretariatan dan kepaniteraan
lap.RB	5%	4,41%	Akan meningkatkan penilaian mandiri pelaksanaan RB
Zona Integritas	5%	5,00%	Supaya dipertahankan
LHKPN	2%	0,07%	Mengupload data pegawai yang sudah mengirim dan menerima LHKPN dari KPK

Jakarta, 31 Maret 2020

Wakil Ketua

DRS. H. SYUAIB, M.H.
 NIP. 196601241993031003

**EVALUASI SOP KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
TAHUN 2019-2020**

NO	NAMA SOP	NOMOR	TGL		KESESUAIAN			KET
			PEMBUATAN	EFEKTIF	BAIK	CUKUP	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi	SOP/AS/01	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
2	SOP Pengembangan Pegawai	SOP/AS/02	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
3	SOP Izin Belajar dan Tugas Belajar	SOP/AS/03	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
4	SOP Pengelolaan Pegawai	SOP/AS/04	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
5	SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS	SOP/AS/05	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
6	SOP Pengelolaan Absensi Pegawai	SOP/AS/06	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
7	SOP Pengajuan Cuti Pegawai	SOP/AS/07	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
8	SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat	SOP/AS/08	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
9	SOP Kenaikan Gaji Berkala	SOP/AS/09	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
10	SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan	SOP/AS/10	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
11	SOP Ijin Perceraian bagi Pegawai	SOP/AS/11	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
12	SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai	SOP/AS/12	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
13	SOP Pemberian Nilai kepada Pegawai	SOP/AS/13	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
14	SOP Pendelegasian wewenang	SOP/AS/14	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
15	SOP Pemberian Penghargaan kepada Pegawai	SOP/AS/15	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
16	SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai & Pejabat Negara	SOP/AS/16	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
17	SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas	SOP/AS/17	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
18	SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif	SOP/AS/18	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
19	SOP Penatausahaan Aset	SOP/AS/19	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
20	SOP Penatausahaan Persediaan	SOP/AS/20	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
21	SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan	SOP/AS/21	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
22	SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan	SOP/AS/22	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
23	SOP Pemberian Informasi	SOP/AS/23	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
24	SOP Pengelolaan Perpustakaan	SOP/AS/24	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
25	SOP Pencairan Anggaran	SOP/AS/25	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
26	SOP Pertanggungjawaban Anggaran	SOP/AS/26	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
27	SOP Penatausahaan PNBPN	SOP/AS/27	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
28	sop Peyusunan Laporan Keuangan	SOP/AS/28	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
29	SOP Penusunan Rencana Program dan Anggaran	SOP/AS/29	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
30	SOP Penyusunan SAKIP	SOP/AS/30	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
31	SOP Penyusunan Laporan	SOP/AS/31	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
32	SOP Pengelolaan TI	SOP/AS/32	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
33	SOP Pintu Akses Masuk dan Keluar	SOP/AS/33	02/03/2020	02/03/2020	√	-	-	Tidak ada Perubahan

Jakarta, 17 Maret 2020
Koordinator Area II

H. M. Arief, S.H.,M.H

**EVALUASI SOP KEPANITERAAN
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
TAHUN 2019-2020**

NO	NAMA SOP	NOMOR	TGL		KESESUAIAN			KET
			PEMBUATAN	EFEKTIF	BAIK	CUKUP	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SOP Layanan Informasi Berbasis TI	SOP/AP/01	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
2	SOP Layanan Pos Bantuan Hukum	SOP/AP/02	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
3	SOP Layanan Sidang diluar Gedung	SOP/AP/03	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
4	SOP Penerimaan Perkara	SOP/AP/04	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
5	SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara	SOP/AP/05	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
6	SOP Layanan Sidang Terpadu	SOP/AP/06	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
7	SOP Penetapan Majelis Hakim	SOP/AP/07	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
8	SOP Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti	SOP/AP/08	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
9	SOP Penetapan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	SOP/AP/09	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
10	SOP Penetapan Hari Sidang	SOP/AP/10	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
11	SOP Pemanggilan Para Pihak	SOP/AP/11	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
12	SOP panggilan Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk perkara perkawinan	SOP/AP/12	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
13	SOP panggilan Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk perkara selain perkawinan	SOP/AP/13	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
14	SOP Panggilan Tergugat/Termohon yang berada diluar negeri	SOP/AP/14	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
15	SOP Permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan ke Pengadilan Agama lain	SOP/AP/15	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
16	SOP Permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan dari Pengadilan Agama lain	SOP/AP/16	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
17	SOP Kegiatan Persidangan	SOP/AP/17	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
18	SOP Pelayanan Mediasi	SOP/AP/18	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
19	SOP Layanan Pemanggilan Saksi	SOP/AP/19	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
20	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/20	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
21	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/21	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
22	SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat	SOP/AP/22	01/03/2018	01/03/2018		-	-	Tidak ada Perubahan
23	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/23	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
24	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/24	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
25	SOP Pelayanan tambah biaya panjar	SOP/AP/25	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
26	SOP Pelayanan Sita Jaminan	SOP/AP/26	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
27	SOP Pelayanan Sita Buntut	SOP/AP/27	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
28	SOP Pelayanan Sita Harta Bersama	SOP/AP/28	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
29	SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	SOP/AP/29	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
30	SOP Pengembalian Uang Sisa Panjar	SOP/AP/30	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
31	SOP Penyampaian Salinan Putusan	SOP/AP/31	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
32	SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah	SOP/AP/32	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
33	SOP Pelayanan Ikrar Talak	SOP/AP/33	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
34	SOP Pelayanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai	SOP/AP/34	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
35	SOP Pengiriman Petikan Salinan Putusan Ke KUA	SOP/AP/35	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
36	SOP Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan	SOP/AP/36	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
37	SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah memenuhi Syarat dengan pemeriksaan sederhana	SOP/AP/37	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
38	SOP Pelayanan penerimaan peerkara Ekonomi Syariah dengan acara sederhana tidak memenuhi syarat	SOP/AP/38	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
39	SOP Pelayanan Keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi syariah telah melewati batas waktu	SOP/AP/39	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
40	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi syariah yang memenuhi batas waktu	SOP/AP/40	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan

**EVALUASI SOP KEPANITERAAN
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
TAHUN 2019-2020**

NO	NAMA SOP	NOMOR	TGL		KESESUAIAN			KET
			PEMBUATAN	EFEKTIF	BAIK	CUKUP	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	SOP Pelayanan Banding	SOP/AP/41	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
42	SOP Pelayanan Kasasi	SOP/AP/42	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
43	SOP Pelayanan Kasasi yang tidak memenuhi syarat Formal dengan alasan melebihi batas waktu	SOP/AP/43	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
44	SOP Pelayanan Kasasi yang tidak memenuhi syarat Formal dengan alasan tidak mengajukan emmori kasasi	SOP/AP/44	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
45	SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	SOP/AP/45	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
46	SOP Pelayanan Prodeo pada Tingkat Pertama	SOP/AP/46	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
47	SOP Pelayanan Prodeo pada Tingkat Banding	SOP/AP/47	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
48	SOP Pelayanan Prodeo pada Tingkat Kasasi	SOP/AP/48	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
49	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	SOP/AP/49	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
50	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	SOP/AP/50	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
51	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	SOP/AP/51	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
52	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	SOP/AP/52	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
53	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	SOP/AP/53	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
54	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang	SOP/AP/54	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
55	SOP Pelayanan bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/55	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
56	SOP Pelayanan bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/56	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
57	SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi	SOP/AP/57	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
58	SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal	SOP/AP/58	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
59	SOP Pengarsipan	SOP/AP/59	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
60	SOP Pelaporan Perkara	SOP/AP/60	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
61	SOP Prosedur Pengaduan	SOP/AP/61	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
62	SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri	SOP/AP/62	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
63	SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa khusus	SOP/AP/63	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
64	SOP Pelayanan Permohonan Itsbat Nikah Volunter	SOP/AP/64	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
65	SOP Pengelolaan ATK Perkara	SOP/AP/65	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
66	SOP Pengelolaan Keuangan perkara	SOP/AP/66	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
67	SOP Pengelolaan Sisa Panjar	SOP/AP/67	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
68	SOP Pendaftaran Perkara melalui E-Court	SOP/AP/68	01/03/2018	01/03/2018	√	-	-	Tidak ada Perubahan
69	SOP PTSP	SOP/AP/69	02/01/2020	02/01/2020	√	-	-	Tidak ada Perubahan
70	SOP Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (e-litigasi)	SOP/AP/70	02/01/2020	02/01/2020	√	-	-	Tidak ada Perubahan
71	SOP Gugatan Mandiri	SOP/AP/71	02/01/2020	02/01/2020	√	-	-	Tidak ada Perubahan
72	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Menggunakan Basis Data Terpadu TNP2K	SOP/AP/72	02/01/2020	02/01/2020	√	-	-	Tidak ada Perubahan
73	SOP Aplikasi SIRAJ	SOP/AP/73	02/03/2020	02/03/2020	√	-	-	Tidak ada Perubahan
74	SOP Media Center	SOP/AP/74	02/03/2020	02/03/2020	√	-	-	Tidak ada Perubahan

Jakarta, 17 Maret-2020
Koordinator Area II

H. M. Arief, S.H.,M.H